

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARA DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Oleh

Sitti Marwa Kharie¹, Ardin Umar²^{1,2}Universitas Pasifik MorotaiEmail: ¹marwa.ithy2017@gmail.com**Article History:**

Received: 06-11-2022

Revised: 16-12-2022

Accepted: 28-12-2022

Keywords:Kejelasan Sasaran
Anggaran, Sistem
Pelaporan, Kinerja
Aparat

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Pulau morotai. Populasi dalam penelitian sebanyak 27 SKPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan judgment sampling sehingga mendapat sampel responden sebanyak 81 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan system pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten pulau morotai

PENDAHULUAN

Pergeseran sistem pengelolaan pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem desentralisasi, berdampak pada perubahan fundamental hubungan tata pemerintahan dan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungan. Memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya pencapaian pemerataan keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada pemerintah daerah, disertai dengan tuntutan yang semakin tinggi terhadap pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Proses perencanaan pembangunan daerah perlu diimbangi dengan ketersediaan: kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Berkaitan dengan hal ini, maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang ingin dicapai perlu dilakukan evaluasi atas kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari

proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Anggaran Berbasis Kinerja yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Untuk dapat menyusun anggaran Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai, agar dapat mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat haruskan dengan menerapkan azas-azas pelayanan publik yang didalamnya meliputi transparasi, akuntabel, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. (Sosilowati, 2016).

Proses penyusunan anggaran, awalnya Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil rancangan KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Selanjutnya, rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. Sedangkan hasil implementasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat di evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi.

Keberhasilan proses penyusunan anggaran salah satunya dapat dipengaruhi oleh sikap/perilaku pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Literatur yang relevan dalam bidang akuntansi pemerintahan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah akuntansi keperilakuan. Pada akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) terdapat pembahasan mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, yang dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi juga dapat meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan organisasi, Arifin, (2012). Penyusunan anggaran diperlukan komonikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi, terutama yang bersifat informasi lokal kerana bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya, dahulu penggaran

dilakukan dengan sistem *top-down*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa anggaran, sehingga bawahan atau pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Hal ini, jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan bawahan maka dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya. Sebaliknya, jika penyusunan anggaran hanya disusun sesuai kehendak bawahan maka juga dapat menimbulkan rendahnya motivasi bawahan dalam mencapai target-target yang optimal.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai mengalami devisa keuangan. Pasalnya sejak empat bulan terakhir, kas keuangan daerah mengalami kekosongan. Kekosongan kas ini sangat berdampak terhadap kinerja SKPD. Khususnya merealisasi segala kegiatan yang menyangkut APBD tahun anggaran 2020. Atas kondisi ini, Benny Laos SH, mengaku heran dengan kinerja Pemkab Morotai dikarenakan kas daerah sampai kosong sejak triwulan pertama dan anggaran digunakan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain kas kosong, anggaran daerah juga mengalami devisa sebesar Rp 136 M, (Berita Malut, 23, Desember 2020). Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa kepala bagian dan sub-sub bidang di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran sehingga kejelasan sasaran anggaran dalam pencapaian target-target yang direncanakan mempengaruhi kinerja mereka. Hal tersebut, mengakibatkan anggaran yang direalisasi tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik. Kejelasan sasaran anggaran harus dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam merealisasinya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Penyebab tidak efektif, dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari kinerja aparat pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian Arifin, (2012) dan Setiawan, (2013), menunjukkan hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang signifikan.

Kinerja pegawai merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan. Kinerja tidak hanya menyangkut karakteristik pribadi masing-masing pegawai, melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang. Setiap organisasi memiliki keinginan untuk mencapai kinerja yang optimal, untuk mencapai kinerja yang optimal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh komitmen yang dimiliki oleh karyawan di dalam organisasi tersebut.

Wujud profesionalisme dan tanggung jawab aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan, diperlukan kualitas kinerja aparatur negara yang berorientasi pada mutu pelayanan publik (*public service*). Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya (Arifin, 2012).

Kejelasan sasaran anggaran digunakan sebagai variabel independen dengan alasan

semakin tepat sasaran anggaran maka semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, apakah system pelaporan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan system pelaporan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten pulau morotai.

LANDASAN TEORI

Teori Kontinjensi

Menurut Etzioni (1985), menyatakan bahwa teori kontinjensi disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan atau teori situasi. *Teori Kontinjensi* berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Pendekatan *kontinjensi* atau pendekatan situasional merupakan suatu pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. *Teori kontinjensi* diadopsi untuk mengevaluasi keefektifan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Para peneliti telah mengemukakan bahwa keefektifan penganggaran partisipatif tergantung pada faktor-faktor kontekstual *organisasional* dan sifat *psikologi* karyawan (Nazaruddin, 2018). Penggunaan teori kontinjensi dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen akan tergantung pada lingkungan, organisasi dan gaya pembuat keputusan (Gordon dan Miller, 1976).

Pada partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran penggunaan *teori kontinjensi* telah lama menjadi perhatian para peneliti. Peneliti terdahulu menggunakan *teori kontinjensi* ketika menghubungkan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah mempunyai faktor-faktor *kontinjensi*, faktor-faktor tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Faktor-faktor kontinjensi tersebut dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Arifin, 2012). Oleh karena itu, sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan anggaran. Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik

Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran, dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Hal demikian, berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pemerintah yang telah ditetapkan. Aparat pemerintah daerah akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan dengan tepat, apabila aparat pemerintah dapat melibatkan dalam proses penyusunan anggaran dan memahami kejelasan sasaran anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah.

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

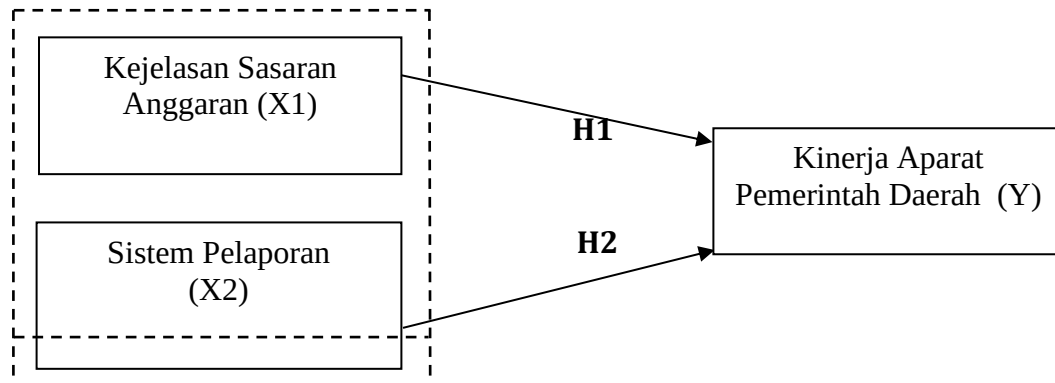
Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2010 terhadap 358 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 32 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 271 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 12 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 43 entitas.

Hasil evaluasi atas 358 LKPD terdapat 1.401 kasus kelemahan akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan belum didukung SDM yang memadai dan penggunaan aplikasi simda/simbada. Berdasarkan hasil evaluasi BPK terbukti bahwa kualitas laporan keuangan dapat ditentukan oleh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Hall (2004:151) mengungkapkan bahwa, The quality of information generated by the accounting information system impacts management's ability to take actions and make decisions in connection with the organization's operations and to prepare reliable financial statements.

Menurut Elvira Zeyn (2011:57) content pelaporan, keakurasian angkaangka yang tertera di laporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

H₁ : Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Gambar 1.1.
Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pulau Morotai Selama 3 bulan (Januari-Februari) 2021. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *judment sampling*. Pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu Sehingga responden dalam penelitian adalah sebanyak 81 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Pengumpulan data dengan survey berarti dalam mengumpulkan data dilakukan pengiriman atau penyebaran kuesioner kepada responden atau dalam hal ini pegawai pada instansi yang menjadi populasi penelitian. Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan diberi penjelasan untuk setiap pertanyaan agar mempermudah responden dalam menjawab. Pilihan jawaban kuesioner menggunakan skala likert. Tipe skala likert pada umumnya menggunakan lima angka pilihan yang harus dijawab oleh responden.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data autentik atau data yang diperoleh langsung dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi mengenai struktur kepegawaian/organisasi dan jumlah pegawai yang menjadi populasi.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi/penyesuaian dari penelitian yang dilakukan oleh Ven (1980) yang awalnya

adalah kinerja manajerial. Penyesuaian tersebut didasarkan pada alasan bahwa kinerja aparat dapat dinilai berdasarkan kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. Pengukuran variabel kinerja aparat pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan skala Interval antara 1 sampai dengan 5. Skor terendah (1) menunjukkan rendahnya kinerja aparat pemerintah daerah dan skor tinggi (5) menunjukkan tingginya kinerja aparat pemerintah daerah. Variabel ini diukur menggunakan 7 instrumen pertanyaan yang dikembangkan oleh Ven (1980) .

Variabel Independen

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dengan tujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga indikator yang dijabarkan ke dalam tujuh pertanyaan dan diukur dengan skala likert 5 poin. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang diadopsi dari tesis Andrias Bangun (2013). Tiga indikator tersebut adalah (a) memahami tujuan anggaran, (b) sasaran yang harus dicapai, dan (c) informasi dalam pengambilan keputusan.

Sistem Pelaporan

Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah dengan mengelompokkan ke dalam kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah, prosedur sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi. (Sistem Akuntansi dan Laporan SKPD USAID 2009). Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengukurannya dengan menggunakan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan 81 kuesioner pada instansi Pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Kuesioner disebarkan sebanyak 81 kuesioner yang diantar langsung kepada responden, kuesioner ditinggalkan kemudian diambil kembali rata-rata 1 minggu setelah kuesioner diserahkan. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data kurang lebih selama 3 minggu. Dari 81 kuesioner yang disebarkan, 76 kuesioner yang kembali, 4 yang tidak dapat diolah, 66 yang dapat diolah, dan 1 yang tidak kembali dengan alasan ada yang keluar kota, cuti dan melanjutkan studi.

Tabel 1. Hasil penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
------------	--------	------------

Kuesioner yang disebar	81	100%
Kuesioner yang tidak dikembalikan	4	15,6%
Kuesioner yang kembali	76	84,4%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	1	11,1%
Kuesioner yang dapat diolah	66	73,3%

Sumber : data diolah Tahun 2021

Dari seluruh responden yang di sebar, peneliti memperoleh 76 responden atau 84,4% dari total kuesioner yang disebar dan hanya 66 atau 73,3% dari total kuesioner yang disebar yang dapat dianalisa.

Demografi Responden

Data demografi responden dalam tabel 4.2 di bawah ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Tabel 4.2 berisi informasi yang disajikan, antara lain umur, tingkat pendidikan dan pengalaman mengikuti Pelatihan tentang Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden laki-laki lebih banyak yaitu 75,8% dibandingkan responden perempuan yang hanya 24,2%. Responden dikelompokkan berdasarkan usia dan diketahui bahwa mayoritas responden berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 45,5%. Kemudian mereka yang berusia lebih dari 21-35 tahun sebanyak 42,4%. Sedangkan mereka yang berusia > 46 tahun sebanyak 12,1%.

Tabel 2. Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi (Orang)	Presentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-Laki	50	75,8
2. Perempuan	16	24,2
Umur		
1. 21-35	28	42,4
2. 36-45	30	45,5
3. > 46	8	12,1
Latar Belakang Pendidikan		
1. SLTA	10	15,2
2. D3	3	4,5
3. S1	42	63,6
4. S2	11	16,7
5. S3	0	0
Pengalaman Pelatihan Keuangan Daerah		
1. Belum Pernah	25	37,9
2. 1 Kali	11	16,7
3. 2-3 Kali	21	31,8
4. > 3 Kali	9	13,6

Sumber: data primer diolah 2021

Uji Validitas dan Uji Realibilitas**Hasil Uji Validitas**

Sebelum dilakukan pengujian data baik untuk deskripsi data penelitian dan untuk pengujian asumsi klasik serta pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan uji validitas dan realibilitas. Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar dari r tabel dengan ($df = n - 2$). Dalam penelitian ini df nya = 66. Dengan menggunakan α 0,05 dan $df = 64$ maka r tabel yang digunakan sebagai pembanding r hitung adalah 0,05 (uji dua sisi). Dimana r tabel untuk sampel sebanyak 64 adalah 0,05. Setelah melakukan uji validitas. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel. Hasil validitas dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Butir Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)	KAPD 1	0,400	0,05	Valid
	KAPD 2	0,470	0,05	Valid
	KAPD 3	0,636	0,05	Valid
	KAPD 4	0,674	0,05	Valid
	KAPD 5	0,620	0,05	Valid
	KAPD 6	0,591	0,05	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	KSA 1	0,892	0,05	Valid
	KSA 2	0,892	0,05	Valid
	KSA 3	0,864	0,05	Valid
	KSA 4	0,872	0,05	Valid
	KSA 5	0,473	0,05	Valid
Sistem Pelaporan (X2)	SP 1	0,589	0,05	Valid
	SP 2	0,700	0,05	Valid
	SP 3	0,774	0,05	Valid
Akuntabilitas Publik (Z1)	Akuntabilitas 1	0,638	0,05	Valid
	Akuntabilitas 2	0,606	0,05	Valid
	Akuntabilitas 3	0,636	0,05	Valid
	Akuntabilitas 4	0,555	0,05	Valid
	Akuntabilitas 5	0,662	0,05	Valid
	Akuntabilitas 6	0,511	0,05	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2021

Uji Realibilitas

Uji realibilitas data yaitu dengan melihat nilai *Crombach's alpha* > 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai *Crombach's alpha* > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel. Hasil uji realibilitas dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Uji Realibilitas Data

Variabel	Cronbach's	Batas Realibilitas	Keterangan
----------	------------	--------------------	------------

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)	0,719	0,6	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,930	0,6	Reliabel
Sistem Pelaporan (X2)	0,744	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Publik (Z1)	0,846	0,6	Reliabel

Sumber : data primer diolah tahun 2021

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan apakah model regresi telah terbebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Multikolenieritas, uji Normalitas, dan uji Heteroskedastisitas.

Uji Multikolenieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (*independen*) saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel *independen*. VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi. Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Berikut tabel 4.5 Uji Multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Multikolenieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	1.000	1.000

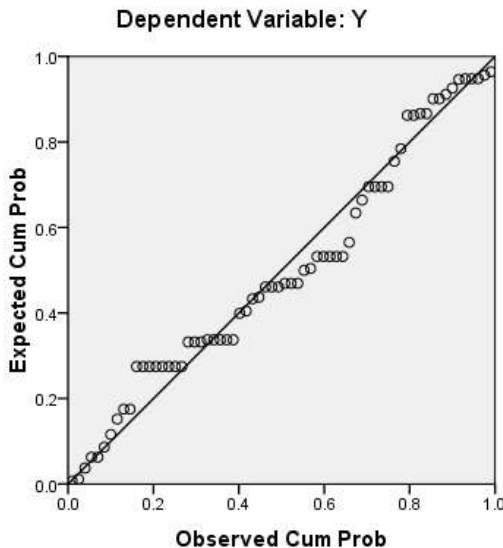
Sumber: data primer diolah 2021

Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa dari variabel *independen* dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat baik variabel independen maupun variabel dependen dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Karena uji normalitas ini merupakan syarat untuk melakukan uji t dan uji F. Pengujian ini menggunakan uji analisis grafik dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

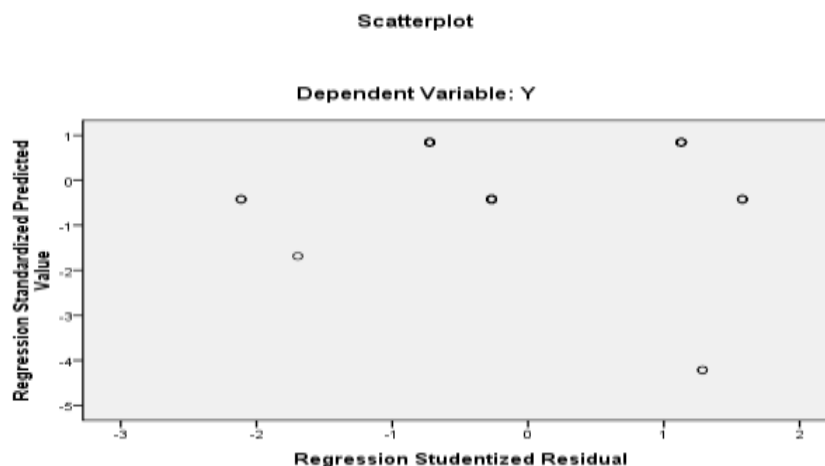
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

**Gambar 1. Normal P- Plot**

Pada gambar 4.1 grafik P-P Plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, grafik P-P Plot menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadixheteroskedastisitas. Berikut adalah gambar untuk melihat ada atau tidak adanya heteroskedastisitas.

**Gambar 2. Scatterplot**

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dikonfirmasi pada tabel 4.11. Tabel 4.11 tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) adalah 2,868 dan nilai t_{tabel} 1,999. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,006.

Tabel 6. Kejelasan Sasaran Anggaran

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.162	.378		8.374	.000
X1	.246	.086	.337	2.868	.006

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer diolah tahun 2021

Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 66-3-1 = 62$ adalah 1,999. Dengan demikian, nilai t_{hitung} 2,868 > t_{tabel} 1,999. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H1 diterima.

Persamaan regresi yang diperoleh dari dari pengujian tersebut, yaitu:

$$Y = 3,162 + 0,246 X1 + e$$

Hipotesis 2

Tujuan pengujian hipotesis 3 adalah untuk mengetahui apakah sistem pelaporan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil analisa regresi terhadap hipotesis 3 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7. Sistem pelaporan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.652	.588		2.808	.007
X1	.101	.094	.138	1.068	.290

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer diolah tahun 2021

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian di atas adalah:

$$Y = 1,652 + 0,101 X_2 + e$$

Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 66-3-1 = 62$ adalah 1,999. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} 1,068 > t_{tabel} 1,999$. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H3 diterima.

Pembahasan

Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin terarah dan tepat tentang hal-hal penyusunan anggaran yang berkaitan dengan perencanaan program, maka semakin baik pula kinerja setiap aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Sriwijayanti (2018).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Hal ini jelas bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, tetapi anggaran juga merupakan alat bagi SKPD untuk mengkordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya daerah seharusnya tidak hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana belanja, tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin dicapai.

. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak puas dalam bekerja hal demikian dapat menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Pelaksana anggaran memberikan realisasi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, Dewi dkk, (2017).

Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga bahwa Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Melasar Dan Fitri Yatun Nisa. (2020). SAKD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2008: 35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi keuangan daerah tidak sama dengan tata buku yang dipraktekkan dalam tata usaha keuangan pada entitas akuntansi seperti SKPD, pemda maupun pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana sistem pencatatan double entry, untuk dapat menyusun neraca diperlukan

adanya sistem pencatatan YANG akurat (appropriate recording).

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Pemerintah daerah perlu mengambil pendekatan yang menempatkan sistem seperti di garis depan, dan mempertimbangkan baik sistem dan faktor terkait manusia sambil mengelola sistem informasi akuntansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, Pengaruh system pelaporan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maupun kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah. Lebih memahami tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) yaitu laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPD) yang disampaikan pemerintah daerah atas pengguna dana APBD kepada DPRD dan masyarakat serta standard operasional prosedur akuntabilitas yang dilakukan lembaga eksekutif.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen yang lain selain dari variabel yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abernethy, M. A., & Lillis, A. M. 1995. "The impact of manufacturing flexibility on management control system design". *Accounting, Organizations and Society*, 20(4).
- [2] Afriyenti, Dwi dkk. 2015. "Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah". *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara* Volume 1 Nomor 1.
- [3] Anjarwati, Mei. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Accounting Analysis Journal* 1 (2) (2012).
- [4] Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan, 2011. *Sistem Pengendalian*. Manajemen. Edisi 12. Buku 2, Karisma Publishing Group, Jakarta.
- [5] Arifin, Solikhun. Anggraini, Reni Dwi. 2017. "Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai

- Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2012-2016). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- [6] . Cahyani dan Utami. 2015. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.
 - [7] Darma, E. S. 2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah". Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
 - [8] Efrizar, R. 2017. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). JOM Fekon, Vol 4, No.1, ISSN: 2355-6854).
 - [9] Fatmala, Juanita. 2014. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah". Jurnal Universitas Bengkulu.
 - [10] Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. 210
 - [11] Govindrajan and Anthony, 2005. Manajemen Control System. Edisi Terjemahan Salemba Empat Jakarta. Gujarati, D.N. 2012. Basic Econometrics. Tata McGraw-Hill Education, Noida.
 - [12] Hafiz, M. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). JOM Fekom. Vol 4 No.1. ISSN Online:2355-6854.
 - [13] Haspiarti. 2012. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare). Artikel Publikasi FEB Universitas Hasanudin.
 - [14] Isnanto, Yogi., Suharmo, Bambang Widarmo. 2019. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 Edisi Khusus Oktober 2019:489-501.
 - [15] Kusumaningrum, I. 2010. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis Universitas Diponegoro.
 - [16] Laksana, A.P dan Handayani, B.D. 2014. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Di Kab. Batang. Accounting Analysis Journal. ISSN:2252-6765.
 - [17] Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: CV.Andi Offset. 211
 - [18] Mariandini, F.L., Irianto, G dan Nurkholis. 2018. Institusional Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang. Jurnal Economia, Vol.12 No.1, EISSN: 2460-115.
 - [19] Pratama Rio, Henri Agustin dan Salma Taqwa. 2019. "Pengaruh Pengendalian

- Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 1 No 1 Seri D.
- [20] Yudianto. 2019. "The Influence Budget Participation, Budget Goals Clarity and Internal Control Systems Implementation on Local Govern,ent Performance". Journal of Accouting Auditing and Business, Volume 2 Nomor 2
- [21] . Riantiarno, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). Pekbis Jurnal Vol.3, No.3, 560-568, ISSN Online: 2085-5214.
- [22] Riswantika, Mia. 2019. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen". Skripsi.
- [23] Riyanto, B. 2003. "Model Kontijensi Sistem Pengendalian: Integrasi dan Ekstensi untuk Future Research". KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi FE UTY Yogyakarta. No: 9. April. 330-342.
- [24] Sri Pebrianti dan Nurma Aziza. 2018. "Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies". Advances in Social Science, Education and Humanities Reseach, Volume 292.
- [25] Zawawi, M. 2016. "Model Akuntabilitas Kinerja SKPD dalam Mewujudkan Good Governance". Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol.1 No.1, ISSN:25020900.
- [26] Widaryanti, W& Pancawardani, N.L. 2018. "Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol 15 No 2 Hal 477-492